

Political Will Pada Implementasi Kebijakan Smart Mobility Pemda DKI Pada Program Jak Lingko Dalam Mengurangi Kemacetan di Jakarta

Rizky Nur Rachman

ABSTRAK

Dominasi penggunaan kendaraan pribadi telah menyebabkan kemacetan di DKI Jakarta yang meresahkan masyarakat selama bertahun-tahun. Sebab hal tersebut Pemda DKI Jakarta mencoba menyelesaikan hal tersebut dengan menerapkan dimensi *smart mobility* dari konsep *smart city* dan kebijakan turunnya yaitu sistem Jak Lingko. Namun, selama beberapa tahun terakhir dua hal tersebut belum berhasil mengurangi kemacetan di Jakarta. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi dari dimensi *smart mobility* dan sistem Jak Lingko menggunakan indikator *smart mobility* dari Wicaksana dan model Implementasi kebijakan dari Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, dan menggunakan metode wawancara dan kajian literatur untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan. Indikator dari Wicaksana, menjelaskan terdapat 3 aspek yang memengaruhi keberhasilan dari implementasi dimensi *smart mobility*, yaitu *Move Freely*, *Less Mobility*, dan *Less Travel Time*. Model implementasi kebijakan dari Grindle sendiri memiliki 2 aspek penting yang berpengaruh dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan data yang sudah dikumpulkan, masih terdapat beberapa kekurangan dari implementasi kebijakan sistem Jak Lingko dan dimensi *smart mobility*. Hal-hal seperti sosialisasi yang menghambat manfaat, target perubahan yang belum tercapai karena pembangunan transportasi publik yang belum menjadi prioritas, pelaksana kebijakan belum mendapatkan kekuasaan dan wewenang yang cukup sehingga ada perbedaan model bisnis antara BUMD transportasi, sumber daya yang belum memadai, penggunaan kekuasaan dan *political will* yang belum optimal, karakteristik dari lembaga yang berkuasa berbeda sehingga belum tercapainya visi dan sinergi bersama, dan tingkat kepatuhan yang belum optimal. Seluruh hal tersebut membuat kebijakan Jak Lingko dan dimensi *smart mobility* belum bisa mencapai tujuannya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, *Smart Mobility*, Jak Lingko, Kemacetan

**Political Will on the Implementation of the DKI Regional Government's
Smart Mobility Policy in the Jak Lingko Program in Reducing Congestion in
Jakarta**

Rizky Nur Rachman

ABSTRACT

The dominance of private vehicle usage has caused traffic jams in DKI Jakarta that have disturbed the public for years. Because of this, the DKI Jakarta Regional Government has tried to solve this by implementing the smart mobility dimension of the smart city concept and its derivative policies, namely the Jak Lingko system. However, over the past few years, these two things have not succeeded in reducing traffic jams in Jakarta. Therefore, the purpose of this study is to analyze the implementation of the smart mobility dimension and the Jak Lingko system using Wicaksana's smart mobility indicators and Grindle's policy implementation model. The method used in this study is qualitative research with a descriptive research design, and uses interview methods and literature reviews to obtain the required research data. Wicaksana's indicators explain that there are 3 aspects that influence the success of the implementation of the smart mobility dimension, namely Move Freely, Less Mobility, and Less Travel Time. Grindle's policy implementation model itself has 2 important aspects that influence the success of implementing a policy, namely Policy Content and Implementation Environment. Based on the results of the study using the data that has been collected, there are still several shortcomings in the implementation of the Jak Lingko system policy and the smart mobility dimension. Things like socialization that hinders benefits, change targets that have not been achieved because public transportation development has not been a priority, policy implementers have not received sufficient power and authority so that there are differences in business models between transportation BUMDs, inadequate resources, use of power and political will that are not optimal, characteristics of the institutions in power are different so that a shared vision and synergy have not been achieved, and the level of compliance is not optimal. All of these things make the Jak Lingko policy and the smart mobility dimension unable to achieve their goals.

Keywords: Policy Implementation, Smart Mobility, Jak Lingko, Congestion